

# Feminisme dan Tata Ruang Kota

Isti Hidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen dan Peneliti, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

---

## Abstract

Public area supposed to give a comfort and safe places to public, without limiting race, age, or gender. In fact, there is a latent dichotomy in using public space due to the subordinate position of women in all aspects of human life. It is a common knowledge that men are working outside and women should stay in home so that the out-of-home urban spaces are designed to fit men activities. As women development grows (emancipation, gender equality, feminism movement), women also have to access the out-of-home urban spaces and found that those spaces are less comfortable and less secure for them. Sexual harassment in the night because of poor lighting and violence in the streets has become a major issue in the feminism concept in urban planning field. If there is smoking room for men, why there is no breastfeeding room for women in public space?

This paper is written in belief that women and men should have an equal access to public space, including safety and comfortable aspect. The qualitative aspects of feminism concept in urban planning field makes it hard in the implementation because there is no exact standard for what is perceived as urban space with feminism concept and what is not. By using content analysis method, this paper tries to find indicators for the implementation of feminism concept in urban area. It is found that threats against women, discrimination, and marginalisation is a key factor of feminism concept and those factors could be an indicators to assess the implementation of feminism concept in urban area.

**Keywords:** gender planning, feminism, shopping area

---

## 1. Latar Belakang

Adanya dikotomi dalam penggunaan ruang antara laki-laki dan perempuan ditengarai telah berlangsung sejak zaman dulu hingga sekarang (Domosh dan Seager, 2001 dalam Ekstam, 2007: p.3). Laki-laki lebih sering bepergian, mulai dari berburu, berperang, dan bekerja. Sementara, perempuan lebih diidentikkan dengan rumah dan pekerjaan domestik sehingga penggunaan ruang bagi perempuan menjadi terbatas hanya seputar rumah dan lingkungan sekitar. Kondisi yang disebabkan perbedaan tugas dan fungsi gender ini kemudian berbias pada desain ruang itu sendiri. Area kerja, berikut ruang antara tempat kerja dan rumah didesain secara “maskulin”, mengikuti penggunaannya yang didominasi oleh laki-laki.

Pada masa sekarang, di mana mulai terjadi pergeseran peranan dan bias gender, ruang-ruang “maskulin” tersebut mulai diisi dan digunakan oleh

perempuan. Perempuan bekerja dan bepergian hampir sama banyaknya dengan yang dilakukan laki-laki, dan juga menggunakan ruang sama banyaknya dengan laki-laki. Namun, ruang-ruang yang telah terbentuk seringkali memberikan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi perempuan. Pelecehan seksual pada perempuan ketika menggunakan transportasi publik ataupun ketika berjalan pada ruang-ruang dengan pencahayaan kurang adalah contoh-contoh ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang menimpa perempuan akibat ruang-ruang “maskulin”.

Kondisi ini kemudian memunculkan gerakan feminisme sebagai sebuah *resistance* terhadap kenyataan yang ada, yaitu bahwa perempuan secara tidak langsung menjadi *inferior* akibat pola-pola ruang yang tercipta. Keprihatinan ini kemudian memunculkan sebuah wacana yang dikenal dengan konsep kota feminis. Konsep ini secara garis besar membahas bagaimana menciptakan sebuah kota berikut infrastrukturnya yang dapat mengakomodasi kegiatan perempuan.

Pada prakteknya, implementasi konsep feminisme dalam perencanaan wilayah dan kota menemui hambatan karena ketiadaan indikator yang jelas (terutama ketiadaan indikator kuantitatif). Dampaknya adalah kesulitan untuk mengidentifikasi apakah suatu

---

Isti Hidayati

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota UGM

Tel: 085643690557 Fax: -

e-mail: justisti@gmail.com

(Redaksi akan menambahkan di sini, tanggal diterima dan disetujui untuk diterbitkan)

area dapat dikatakan memenuhi konsep feminisme atau tidak. Paper ini berusaha untuk mencari indikator tersebut sehingga akan mempermudah implementasi konsep feminisme dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil *library research* dengan eksplorasi pada konsep feminisme dan *planning*. Eksplorasi dilakukan terhadap konsep feminisme dan *gender planning* dalam dunia perencanaan wilayah dan kota untuk memunculkan indikator penilaian apakah sebuah area bisa dikatakan memenuhi prinsip-prinsip feminisme dalam tata ruang.

## 3. Feminisme

Frase 'feminisme' muncul di Inggris pada tahun 1890 yang bisa diartikan sebagai sebuah paham (belief) tentang persamaan gender (Humm, et.al, 1992 : 1). Sementara gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan (Supradiono, 2007). Perbedaan tanggung jawab tersebut kemudian mengakibatkan "doing gender", yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan atribut personal gender yang melekat dalam dirinya, dan untuk melakukannya dibutuhkan sebuah persyaratan-persyaratan tertentu (precondition) (Schultz, 2000 : p 4-5).

Kalimat ini menjadi sebuah penegasan adanya kebutuhan mendasar yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan baik secara fisiologis maupun psikologis. Perempuan cenderung lebih rentan dengan adanya penerangan yang kurang pada ruang-ruang sempit (Roze-Koker, et al, 1989 dalam Rozee, 2004 : p.281). Namun seringkali perbedaan kebutuhan ini kurang diakomodasi sehingga muncul kondisi ketidakadilan gender yang kemudian memicu gerakan feminisme.

Gerakan penolakan inferioritas perempuan untuk mencapai kesetaraan gender (walaupun mungkin pada waktu itu belum disebut dengan gerakan feminis) tercatat pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1972. Gerakan ini dimotori oleh Mary Wollstonecraft's berupa argumen politik untuk hak perempuan "A Vindication of the Rights of Woman" yang berisi analisis psikologikal tentang kecurigaan bahwa perempuan dirugikan oleh adanya ketergantungan pada laki-laki dan terisolasinya perempuan dari ruang publik. Sementara di Amerika Serikat, gerakan menuntut kesetaraan gender muncul pada tahun 1890 yang dimotori oleh Elizabeth Cody Stanton dan Susan B. Anthony melalui kampanye anti perbudakan dan minuman keras (*anti-slavery and temperance campaign*) (Humm, et.al, 1992). Gerakan feminisme secara formal mulai gencar setelah Deklarasi HAM PBB 1948 (BKKBN, 2004).

Pada akhir tahun 1990-an, kaum pemikir dan

peneliti feminis mulai memasuki kancah sains dengan mengatakan bahwa peran perempuan dalam sains telah termarginalkan selama ini dan ideologi sains yang berlaku merupakan ideologi patriarkikal (Hess dan Ferre, 1987 dalam Campbell dan Fainstein, 1996). Kerusakan bumi saat ini dianalogikan sebagai akibat dari eksploitasi kaum laki-laki (maskulin) terhadap bumi yang pasif (feminin) (Schultz, 2000 : p 4-5).

## 4. Konsep Feminisme dalam Tata Ruang

Pemikiran kaum feminisme terhadap pola spasial muncul baik dalam skala makro regional ataupun pada skala mikro. Pada skala makro, konsep feminisme berpijak pada bagaimana menciptakan habitat yang lebih baik bagi manusia. Konsep ini menyatakan bahwa ketidaknyamanan lingkungan saat ini diakibatkan pola hidup "maskulin" yang selalu berorientasi pada efisiensi tanpa mempertimbangkan aspek humanitas (Day, 2002). Sedangkan pada skala mikro, konsep feminisme hadir karena melihat fakta bahwa ruang publik ter'gender'isasi dan perempuan telah termarginalkan dalam pemanfaatan ruang.

Salah satu contoh marginalisasi perempuan dalam pemanfaatan ruang adalah dalam hal mobilitas. Kecenderungan penambahan penduduk menyebarkan perkembangan permukiman ke arah peri-peri. Perkembangan pembangunan permukiman ke arah peri-peri ternyata memberikan kesulitan tersendiri bagi perempuan, karena mobilitas yang bisa dilakukan perempuan semakin terbatas (Greed, 1994). Pada kawasan permukiman di pinggiran kota, transportasi umum biasanya sangat terbatas dan jarang. Sementara, akses perempuan terhadap kendaraan pribadi tergolong masih sangat lemah (Wekerle, 1981; Hanson and Hanson, 1980; Beuret, 1991; Rosenbloom, 1993 dalam Asiyambola, 2007 : p.12). Dalam satu rumah tangga dengan kepemilikan satu kendaraan pribadi, maka akses terhadap kendaraan tersebut akan lebih diprioritaskan bagi laki-laki dan bukan perempuan.

Secara umum, isu spasial dalam perspektif kaum feminis mencakup beberapa aspek seperti yang diutarakan Campbell dan Fainstein (1996), yaitu :

1. Adanya perbedaan penggunaan ruang publik oleh laki-laki dan perempuan
2. Adanya ancaman terhadap keamanan dari tiap individu dalam melakukan aktivitasnya di kota
3. Adanya diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam perkembangan ekonomi
4. Adanya pola transportasi tertentu yang dilakukan perempuan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kota.

Walaupun isu feminisme dan kesetaraan gender telah mencuat di berbagai hal termasuk tata ruang, namun pada kenyataannya tetap tidak ada perubahan yang berarti dalam tata ruang tersebut. Walaupun seorang perempuan adalah kepala dari departemen

perencanaan kota, namun ketika ia berjalan seorang diri di malam hari ia hanyalah seorang perempuan. Perempuan masih terus diidentifikasi pada urusan domestik dan ruang publik masih identik dengan laki-laki, dan hal ini dianggap sebagai sebuah kewajaran (Keeble (1986) dalam Clara H.Greed (1994)).

## 5. Gender Planning

Gender dapat didefinisikan sebagai suatu struktur sosial yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi secara sosial dan individu (Weller dalam Schultz, 2000). Artinya, adanya atribut gender tertentu pada kehidupan seseorang berimplikasi pada kehidupan seseorang, baik secara sosial dengan adanya perbedaan peran gender di masyarakat, maupun secara individual yaitu bagaimana kehidupan kesehariannya sebagai seseorang dengan atribut gender tertentu. Sebagai contoh, perempuan memiliki pola tertentu dalam mobilitas yang mempengaruhi pola transportasi. Perempuan cenderung mengkombinasikan perjalanan antara berangkat ke kantor dengan mengantar anak dan kemudian berbelanja.

Perbedaan struktur sosial ini kemudian mengakibatkan “*doing gender*”, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan atribut personal gender yang melekat dalam dirinya tersebut menjadi membutuhkan sebuah persyaratan-persyaratan tertentu (*precondition*). Kalimat ini menjadi sebuah penegasan adanya kebutuhan mendasar yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, yaitu ketika dalam melakukan suatu kegiatan laki-laki merasa sudah tercukupi kebutuhannya, namun bagi perempuan, ketika melakukan hal yang sama, kebutuhannya tidak terpenuhi. Contohnya adalah kebutuhan akan keamanan. Perempuan memiliki ketakutan tertentu akan terjadinya tindakan kriminal seperti perampokan atau pemerkosaan (rape). Ketakutan ini seringkali dianggap wajar, seperti yang dikemukakan Susan Griffin (1979) dalam Rozee (2004) :

“Fear of rape is universal among women” (Griffin, 1979, dalam Rozee, 2004 : 277)

Kewajaran ini disebabkan karena sebagian besar korban dari perampokan atau pemerkosaan adalah perempuan sehingga perempuan menjadi rentan terhadap isu tersebut dan tersosialisasi untuk menjadi takut, seperti yang dikemukakan Stanko (1993) dalam Rozee (2004) :

“Women fear rape because women worldwide are the primary victims of rape and other forms of male sexual violence, women perceive a likelihood of becoming victimized, women are socialized to be vulnerable and to fear it.” (Stanko, 1993 dalam Rozee, 2004 : 281)

Adanya precondition seperti yang disebutkan Schultz memberi dampak munculnya kondisi ketidakadilan gender, yaitu adanya diskriminasi yang tidak menguntungkan salah satu pihak, yang diakibatkan oleh adanya suatu konstruksi sosial. Bentuk dari ketidakadilan gender tersebut adalah sebagai berikut (Supradiono, 2007) :

1. Marginalisasi;
2. Stereotype;
3. Kekerasan;
4. Beban ganda

Keempat bentuk ketidakadilan gender ini bisa muncul bersamaan dalam satu waktu, namun bisa juga terjadi secara terpisah. Untuk menyikapi ketidakadilan gender, dibutuhkan suatu upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Upaya inilah yang kemudian disebut dengan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, pengarusutamaan gender muncul dalam bentuk gender planning.

Dalam gender planning, perencanaan kota tidaklah netral dari gender. Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan tentunya juga berimplikasi pada perbedaan kebutuhan ruang dan seharusnya perencanaan kota dapat mengakomodasi adanya perbedaan tersebut. Di Indonesia, gender planning mulai diterapkan di bidang kebijakan dengan penyediaan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan di dewan legislatif. Namun demikian, kuota 30% keterwakilan tersebut belum membawa pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan pembangunan yang sensitif terhadap isu gender dan keberpihakan terhadap perempuan.

Kabeer (1994) dalam Lassa (2007) mengidentifikasi tiga jenis kebijakan gender planning :

1. Gender neutral, mengasumsikan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang bebas-gender, termasuk dampak dari pembangunan tersebut. Jenis kebijakan ini banyak diadopsi oleh pemerintah kota (Mushamba, 2001)
2. Gender sensitive, merespon perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara spesifik
3. Gender redistributive, melakukan transformasi gender untuk menciptakan keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan

Penerapan gender planning diakomodasi oleh UN Habitat (2007) dengan menyusun *Gender Responsive Tools* sebagai bagian dari *Urban Governance Tool Kit*. *Gender Responsive Tool Kit* berfungsi sebagai alat untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan mencakup beberapa hal :

1. Penggunaan metode dengan perspektif yang

sensitif terhadap gender, misalnya penggunaan survei terhadap korban kriminalitas yang berjenis kelamin perempuan (*women victimisation survey*) untuk memformulasikan strategi pencegahan kriminalitas terhadap perempuan

2. Analisis stakeholder (*Stakeholder Analysis*)
3. Pembangunan kapasitas, misalnya bahwa walaupun perempuan memiliki lebih banyak keterbatasan, namun perempuan tetap bisa memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan dengan apa yang dilakukan laki-laki pada bidang pekerjaan yang sama.

## 5. Perspektif dalam Konsep Feminisme dan Tata Ruang

Kesadaran akan inferioritas perempuan dalam penataan ruang memberi peluang bagi terciptanya penjelasan “kenapa hal itu terjadi”. Dalam pandangan feminisme, walaupun perempuan-laki-laki berbeda secara biologis, namun dalam pandangan kaum feminis, seharusnya perbedaan tersebut tidak membawa konstruksi sosial yang merugikan kaum perempuan (Greed, 1994), termasuk dalam hal

pemanfaatan ruang. Setidaknya terdapat 3 penjelasan, yaitu dari sisi (1) perspektif feminis liberal; (2) perspektif feminis radikal; dan (3) perspektif feminis sosialis. Dalam pandangan feminis liberal, kaum laki-laki dianggap tidak menyadari adanya diskriminasi pada perempuan karena sudah merupakan konstruksi sosial yang umum terjadi (Jagger, 1983 dalam Greed, 1994). Sementara dari sisi feminis radikal, penataan kota dipandang sebagai bagian konspirasi dari kaum laki-laki untuk tetap me’marginalkan’kan perempuan. Sedangkan dari perspektif feminis sosialis, tradisi patriarki tidak dapat dielakkan dalam konstruksi sosial masyarakat, namun adanya ketidaksetaraan gender yang memarginalkan kaum perempuan lebih disebabkan oleh manifestasi kapitalis (McDowell, 1986 dalam Greed, 1994).

## 6. Indikator Feminisme dalam Tata Ruang

Ketiga perspektif feminisme dalam tata ruang tersebut mengisyaratkan terjadinya bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam lingkup spasial. Berbagai konsep ataupun preposisi yang mengungkapkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut memunculkan indikator berupa kata kunci yang menjadi faktor utama dalam konsep feminisme:

**Tabel Indikator Konsep Feminisme dalam Tata Ruang**

Teori/ Konsep / Preposisi	Indikator
Bentuk dari ketidakadilan gender : 1. Marginalisasi; → 2. <i>Stereotype</i> ; 3. Kekerasan; → 4. Beban ganda → (Supradiono, 2007)	Marginalisasi Ancaman Diskriminasi
“ <i>Fear of rape is universal among women</i> ” (Griffin, 1979, dalam Rozee, 2004 : 277)	Adanya ketakutan yang dialami perempuan menunjukkan adanya <b>ancaman</b> sehingga perempuan tidak berani berjalan keluar di malam hari.
“ <i>The fear of rape keeps women off the streets at night. Keeps women at home. Keeps women passive and modest for fear that they be thought provocative</i> ” (Griffin, 1979 dalam Rozee, 2004 : 277)	
Akses perempuan terhadap kendaraan pribadi tergolong masih sangat lemah. (Wekerle, 1980; Hanson and Hanson, 1980; Beuret, 1991; Rosenbloom, 1993 dalam Asiyanbola, 2007)	Mengindikasikan adanya <b>diskriminasi</b> dalam hal akses terhadap kendaraan pribadi
Adanya zonasi yang memisahkan antara zona industri dan permukiman membuat jarak antara tempat kerja dengan rumah, sehingga bagi perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam mengkombinasikan antara pekerjaan di luar rumah dengan pekerjaan dalam rumah (pekerjaan rumah tangga). (Greed, 1994)	Mengindikasikan adanya <b>marginalisasi</b> terhadap perempuan karena pola tata ruang yang disusun memberikan kesulitan terhadap perempuan.
“ <i>The public arena has been described as masculine since the 1500th century. During this time women’s access to the public were strictly limited and they where mostly banished to the home.</i> ” (Domosh dan Seager, 2001 dalam Ekstam, 2007:3)	<b>Diskriminasi</b> terhadap perempuan karena akses mereka ke ruang publik sangat terbatas ( <i>limited</i> )

<p>Isu spasial dalam perspektif kaum feminis mencakup beberapa aspek (Campbell dan Fainstein, 1996) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perbedaan penggunaan ruang publik oleh laki-laki dan perempuan</li> <li>2. Adanya ancaman terhadap keamanan dari tiap individu dalam melakukan aktivitasnya di kota</li> <li>3. Adanya diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam perkembangan ekonomi</li> <li>4. Adanya pola transportasi tertentu yang dilakukan perempuan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kota</li> </ol>	<p>Poin ke-2 dan ke-3 mengindikasikan adanya <b>ancaman</b> dan <b>diskriminasi</b> terhadap perempuan.</p>
--	---

Berdasarkan tabel tersebut, bagaimana sebuah ruang bisa mengakomodasi perempuan, terlihat dari tiga aspek sebagai berikut :

#### 1. Ancaman

Sebuah ruang yang bisa mengakomodasi perempuan adalah ruang di mana perempuan tidak merasakan ancaman ketika ia beraktivitas dalam ruangan tersebut. Ancaman yang paling banyak ditemui oleh perempuan biasanya adalah ancaman akan adanya kekerasan fisik (seperti perampokan, pencopetan) atau pelecehan seksual. Ancaman ini biasanya akan muncul dalam ruangan yang cenderung terisolasi dan ruangan dengan penerangan atau pencahayaan kurang.

#### 2. Diskriminasi

Aspek lain yang mengindikasikan sebuah ruang yang akomodatif bagi perempuan adalah tidak adanya diskriminasi bagi perempuan dalam ruangan tersebut. Aspek diskriminasi ini harus dicermati lebih baik. Tidak adanya diskriminasi jangan diartikan bahwa semua ruang harus sama untuk perempuan dan laki-laki. Jika diartikan demikian, maka toilet perempuan dan laki-laki akan menjadi sama. Kondisi ini tentu saja berlawanan dengan konsep pengarusutamaan gender dan feminisme yang mengakui adanya perbedaan fisik dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak adanya diskriminasi di sini adalah porsi pemanfaatan ruang yang sama. Jika laki-laki mempunyai ruang khusus untuk merokok (smoking room), maka seharusnya perempuan mempunyai ruang khusus untuk menyusui.

#### 3. Marginalisasi

Aspek ketiga yang menentukan apakah sebuah ruang akomodatif bagi perempuan atau tidak adalah adanya marginalisasi. Ruang yang “feminis” atau akomodatif bagi perempuan adalah ruang yang tidak memarginalkan perempuan.

Ketiga aspek tersebut dalam perencanaan dan

pemanfaatan ruang publik harus diperhatikan, terutama pada ruang-ruang di mana perempuan banyak beraktivitas di dalamnya (misal kawasan perbelanjaan, pasar, atau perumahan). Lebih lanjut, ruang atau mungkin pada skala yang lebih besar, yaitu kawasan, dinamai sebagai ruang yang tidak feminis bila perempuan merasakan ancaman, diskriminasi, ataupun marginalisasi dalam pemanfaatan ruang tersebut. Implikasi dari hal ini adalah perencanaan kota harus lebih tanggap dengan menciptakan ruang kota yang meminimalkan aspek ancaman, diskriminasi, ataupun marginalisasi terhadap perempuan.

Pada prakteknya, ketiga aspek feminisme (ancaman, marginalisasi, ataupun diskriminasi) masih sering ditemukan pada berbagai bentuk pemanfaatan fasilitas publik di Indonesia. Sebagai contoh, transportasi publik masih memberikan ancaman pada perempuan dengan resiko yang lebih besar terhadap pelecehan seksual. Upaya untuk meminimalisir kondisi tersebut telah dilakukan dengan adanya gerbong khusus perempuan di beberapa wilayah (Jakarta, Yogyakarta). Namun demikian, implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan meminimalkan ancaman, marginalisasi, dan diskriminasi pada perempuan masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

## 7. Kesimpulan

Perempuan merupakan anggota masyarakat yang menempati ruang kota sama dengan laki-laki. Sudah seharusnya perencanaan kota tidak hanya berorientasi pada efektifitas dan efisiensi, tetapi juga pada sisi humanitas, termasuk di dalamnya feminisme. Implementasi konsep feminisme dalam kegiatan perencanaan ataupun pembangunan kota merupakan sebuah upaya menciptakan kehidupan perkotaan yang nyaman bagi semua gender. Suatu area, kawasan, ataupun kota yang dikatakan mengadopsi konsep feminisme berpijak pada tiga indikator, yaitu tidak adanya ancaman, diskriminasi, ataupun marginalisasi pada perempuan dalam bentuk

apapun, termasuk dalam hal akses terhadap pemanfaatan ruang kota.

## Referensi

- 1) Anonymous (2004). "Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional" kerjasama Kementerian Sumber Daya Perempuan, BKKBN, dan UNFPA
- 2) Asiyabola, Raimi Abidemi (2007). "Intra-urban transportation, Gender and Psychological Distress in Developing Countries: Nigeria", paper yang dipublikasikan dalam workshop Urban Population, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi 11-13 Juni 2007, pp.12
- 3) Baxi, Pratiksha (2003). "Unsafe in the City : Create Gender-friendly Spaces" sebuah artikel yang dipublikasikan dalam <http://timesofindia.indiatimes.com> diakses tanggal 29 Oktober 2007 pukul 12.15
- 4) Beuret Kristine, (1991) "Women and Transport" dalam Asiyabola, Raimi Abidemi (2007). "Intra-urban transportation, Gender and Psychological Distress in Developing Countries: Nigeria", paper yang dipublikasikan dalam workshop Urban Population, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi 11-13 Juni 2007, pp.12
- 5) Campbell, Scott and Fainstein, Susan S. (1996). *Reading in Planning Theory*. Cambridge. Blackwell Publishers
- 6) Day, Kristen (2002). "The Ethic of Care and Women's Experiences of Public Space" abstraksi yang disajikan online pada tanggal 26 Maret 2002 dalam <http://www.sciencedirect.com> diakses pada tanggal 13 Februari 2008 pukul 12.21
- 7) Domosh, M. & Seager, J. (2001) "Putting women in place: feminist geographers make sense of the world" dalam Ekstam, Helen (2007). *A Feminist Perspective on Compact Living*, sebuah paper dalam Konferensi Internasional Sustainable Urban Areas, Rotterdam, 25 – 28 Juni
- 8) Greed, Clara H. (1994). *Women & Planning Creating Gendered Realities*, New York, Routledge, pp. 36, 40-44
- 9) Hanson, S. and Hanson P. (1980) "The impact of women's employment on Household travel patterns: A Swedish example", dalam Asiyabola, Raimi Abidemi (2007). "Intra-urban transportation, Gender and Psychological Distress in Developing Countries: Nigeria", paper yang dipublikasikan dalam workshop Urban Population, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi 11-13 Juni 2007, pp.12
- 10) Humm, Maggie et.al (1992). *Feminism : A Reader*, Hertfordshire, Harvester Wheatsheaf, pp. 1-4, 11, 87, 181
- 11) Kabeer N. (1994). "Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development" dalam Lassa, A., Jonatan. (2007). "Kerangka Analisis Perencanaan Gender " didownload dari [http://www.zef.de/module/register/media/e0ad\\_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc](http://www.zef.de/module/register/media/e0ad_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc), diakses Juli, 2010
- 12) Lassa, A., Jonatan. (2007). "Kerangka Analisis Perencanaan Gender " didownload dari [http://www.zef.de/module/register/media/e0ad\\_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc](http://www.zef.de/module/register/media/e0ad_Kerangka%20Analisis%20Perencanaan%20Gender-Jonatan%20Hivos.doc), diakses Juli, 2010
- 13) Kanes-Weisman, L. (1992). "Discrimination by Design: A Feminist Critique of the Man-Made Environment", dalam Lenice (2007). *Feminist Perspectives Of Inner City Planning And Perceptions Of Safety*, dipublikasikan dalam <http://www.blog.roughtheory.org> diakses tanggal 18 September 2007 pukul 13.30
- 14) Mushamba, Singirayi (2001). "Gender: Building Strength through Inclusive Governance", paper presented on African Local Government Action Forum (ALGAF), June, 1, 2001
- 15) Rosenbloom, S. (1993) "Women's Travel Patterns at Various Stages of their lives" dalam Asiyabola, Raimi Abidemi (2007). "Intra-urban transportation, Gender and Psychological Distress in Developing Countries: Nigeria", paper yang dipublikasikan dalam workshop Urban Population, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi 11-13 Juni 2007, pp.12
- 16) Rozee, Patricia, D. (2004). *Lectures on the Psychology of Women : third edition*. New York, Mc.Graw-Hill, pp. 277, 280-281
- 17) Schultz, Irmgard (2000). "Research Within the Frame of "Gender and Environment" – a Look at the Debate in Germany" sebuah paper pp. 4-5
- 18) Suprapdiono, Giri (2007). "Pengarusutamaan Gender", bahan paparan pada Diklat JFP Madya angkatan II tahun 2007, 30 Juli – 13 Agustus 2007, MPKD, Yogyakarta
- 19) Wekerle G. R. (1981) "Women in the Urban Environment". dalam Asiyabola, Raimi Abidemi (2007). "Intra-urban transportation, Gender and Psychological Distress in Developing Countries: Nigeria", paper yang dipublikasikan dalam workshop Urban Population, Development and Environment Dynamics in Developing Countries, Nairobi 11-13 Juni 2007, pp.12